

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan *non-bank*. Untuk lembaga keuangan bank di Indonesia, itu terdiri dari bank sentral dan ada juga bank umum. Lembaga keuangan *non-bank* yang ada di Indonesia itu seperti pasar modal, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, pegadaian, dan masih banyak lagi yang lain. Selain lembaga keuangan yang disebutkan sebelumnya, setiap daerah yang ada di Indonesia juga memiliki lembaga keuangannya sendiri. Seperti misalnya pada Provinsi Jawa Barat, mereka memiliki lembaga keuangan yang diberi nama Badan Kredit Kecamatan (BKK), ada juga lembaga keuangan yang bernama Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK). LPK digunakan oleh masyarakat di daerah Jawa Tengah, kemudian ada Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatra Barat, dan di Bali sendiri ada lembaga keuangan yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di setiap Desa Adat / Desa Pekraman yang ada di Bali.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sudah berdiri semenjak tahun 1988, didirikannya LPD ini didasari oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 mengenai Lembaga Perkreditan Desa. Keberadaan LPD memiliki manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Pekraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Bali adalah sebuah lembaga keuangan yang digunakan oleh masyarakat desa setempat sebagai wadah untuk

mengumpulkan dana/menabung, bisa juga untuk menerima kredit, dan kerap kali dijadikan sumber pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan di Desa Pekraman. Selain memberikan manfaat dalam memberikan dana pinjaman, LPD juga bermanfaat bagi masyarakat karena telah menambah lowongan pekerjaan. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga diharapkan mampu menghapus keberadaan rentenir dengan menyediakan layanan pinjaman.

Dalam menjalankan sebuah perusahaan ataupun lembaga keuangan, dalam satu periodenya pasti akan dilakukan pelaporan seluruh kegiatan keuangan dari lembaga keuangan tersebut dalam bentuk ikhtisar keuangan atau bisa disebut sebagai laporan keuangan. Dibuatnya laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai oleh lembaga keuangan tersebut dalam satu periode waktu. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan terkait bisnis dan juga ekonomi. Laporan keuangan yang baik dan berkualitas akan menyajikan informasi-informasi yang relevan, andal, bisa dibandingkan, dan bisa dipahami dengan mudah oleh para pengguna laporan keuangan tersebut. Karena hal tersebut, penting bagi manajemen sebuah lembaga keuangan untuk menyusun laporan keuangannya secara konsisten dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga memiliki laporan keuangan yang dilaporkan di setiap bulan, tiap 3 bulan sekali, dan laporan keuangan tahunan.

Kualitas laporan keuangan sebuah lembaga keuangan bisa dilihat dari seberapa besar informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan bagaimana

laporan tersebut disajikan sesuai dengan konseptual dan tujuan, serta prinsip-prinsip dasar dari akuntansi. Baik dan buruknya dari kualitas sebuah laporan keuangan juga bisa dinilai melalui lembaga keuangan itu sendiri, apakah lembaga keuangan tersebut sehat atau tidak. Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu mencerminkan seberapa jauh laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur dan adil tentang penyajian posisi keuangan yang jadi dasar kinerja dari lembaga keuangan.

Dalam penyusunan sebuah laporan keuangan, seingkali terjadi fenomena kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ataupun sebuah lembaga keuangan daerah seperti LPD. Di Indonesia, kasus-kasus kecurangan ini sudah sering terjadi dimana adanya ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan fakta-fakta riil yang sebenarnya terjadi. Kecurangan-kecurangan ini biasa terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi laporan keuangan dengan meningkatkan laba perusahaan sehingga laporan keuangan yang disajikan menarik di mata investor maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pihak manajemen dapat memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, beberapa kasus kesalahan penyajian dari laporan keuangan terjadi karena adanya kesalahan penyajian maupun perhitungan yang disebabkan oleh *human error*, sehingga terdapat perbedaan angka yang disajikan dalam laporan keuangan dengan data yang sebenarnya. Kecurangan dalam penulisan laporan keuangan ini tentunya dapat membuat kualitas dari laporan keuangan tersebut menjadi buruk sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan atau lembaga keuangan yang bersangkutan.

Kecurangan dalam penulisan laporan keuangan tentunya memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan perusahaan dan pemangku kepentingannya. Kecurangan penulisan laporan keuangan dapat menyebabkan terjadinya korupsi karena dengan memanipulasi laporan keuangan, maka aset yang dimiliki dapat disalahgunakan oleh kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Contoh kasus korupsi LPD yang diunggah oleh DetikBali.com adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan ketua LPD Sangeh sebesar Rp. 57,2 Miliar yang terjadi pada kisaran tahun 2017-2020, modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan membuat kredit fiktif di LPD Sangeh dan memalsukan catatan laporan keuangannya. Ada juga kasus korupsi yang diunggah oleh BaliPost.com mengenai kasus korupsi dilakukan oleh mantan ketua LPD Gulingan dengan nominal kerugian sebesar Rp. 30,9 Miliar, tindakan korupsi tersebut dilakukan selama masa jabatannya dari tahun 2004 hingga tahun 2020. Terakhir, ada kasus korupsi LPD yang terjadi di Kecamatan Mengwi yaitu korupsi yang terjadi di LPD Kapal dan melibatkan mantan ketua LPD yang menjabat saat itu. Tindakan korupsi ini mulai terendus pada tahun 2016 dan kerugian yang dialami LPD Kapal mencapai Rp. 15 Miliar (Baliexpress.com). Tindakan korupsi tentunya sangat merugikan bagi LPD dan juga para pemangku kepentingan lainnya, maka dari itu perlu adanya upaya-upaya untuk mencegah kecurangan-kecurangan seperti ini dapat terjadi lagi.

Penerapan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dikatakan dapat mencegah terjadinya korupsi (Prastika, 2020). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah prinsip yang digunakan oleh perusahaan sebagai pedoman untuk menciptakan manajemen perusahaan yang

baik dan memperhatikan *stakeholders*. Adapun yang dimaksud *stakeholders* dalam ruang lingkup LPD adalah krama desa, pemerintah setempat, pihak pengelola, dan juga masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip GCG tentunya dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam penulisan laporan keuangan, sehingga dapat menjaga kualitas dari laporan keuangan. GCG memiliki 5 prinsip yang dapat diterapkan yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG, diharapkan dapat menekan kasus-kasus korupsi yang terjadi ataupun dapat mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam penulisan laporan keuangan di perusahaan-perusahaan ataupun di lembaga keuangan daerah seperti LPD. Berdasarkan pada uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja LPD di Kecamatan Mengwi”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dimuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah prinsip transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi?
- 2) Apakah prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi?
- 3) Apakah prinsip responsibilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi?

- 4) Apakah prinsip independensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi?
- 5) Apakah prinsip kewajaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis apakah prinsip transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis apakah prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis apakah prinsip responsibilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis apakah prinsip independensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis apakah prinsip kewajaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

- a) Untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teori.
- b) Dapat menambah wawasan mengenai permasalahan yang dihadapi perusahaan yang berhubungan dengan dunia kerja.
- c) Dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas, serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi.

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi LPD, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi LPD yang ada di Kecamatan Mengwi, guna meningkatkan kualitas laporan keuangan LPD melalui penerapan prinsip-prinsip GCG.
- b) Penelitian yang dilakukan diharapkan berguna bagi mahasiswa dan memberi ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan perguruan tinggi, dan menambah wawasan serta memberikan inspirasi bagi mahasiswa dengan penelitian sejenis tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (Jensen & Meckling, 1976). *Agency Theory* adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pihak pemilik dan pengelola organisasi bisnis. Pencapaian suatu tujuan dan kinerja organisasi bisnis berkaitan erat dengan kinerja manajemen organisasi. Penerapan *Agency Theory* pada LPD dapat dilihat pada hubungan antara pihak pengelola LPD dengan desa pakraman. Dimana pihak pengelola LPD adalah agen, sedangkan Desa Pakraman adalah prinsipal. Pihak pengelola LPD merupakan pihak yang mengelola operasional perusahaan sehari-hari, sedangkan Desa Pakraman sebagai pihak principal menginginkan keputusan yang menguntungkan bagi investasi mereka di LPD. Pihak *principal* dan *agent* ini tentunya menginginkan adanya keuntungan masing-masing, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan terjadinya konflik keagenan, dan teori keagenan tersebut mendorong munculnya konsep *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan bisnis dari LPD itu sendiri, dimana *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meminimumkan konflik tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para agen.

2.1.2 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan sebuah lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Pakraman. Desa Pakraman memiliki tuntutan untuk dapat mengelola perekonomian yang berdiri sendiri, sehingga pada di tahun 1984 pemerintah provinsi Bali memberikan sebuah ide untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di seluruh desa pakraman yang ada di Bali pada tahun 1984 dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 mengenai “Pendirian LPD pada Provinsi Daerah Tingkat I Bali”. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra merupakan penggagas LPD di Bali meniru konsep dari “Seka” yang telah lama berkembang di Bali. Terinspirasi dari konsep “seka”, maka didirikanlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan konsep yang seperti itu sebagai sebuah lembaga keuangan komunitas adat yang memiliki tujuan dalam memberikan bantuan desa adat didalam memenuhi fungsi budayanya. LPD adalah lembaga keuangan yang dimiliki desa pakraman yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumber daya keuangan yang menjadi milik desa pakraman di dalam bentuk simpan pinjam. Penyedia kebutuhan pembiayaan hidup anggota masyarakat desa pakraman, baik dengan sendiri ataupun dengan bersama, didalam rangka mengembangkan fungsi sosio-kultural juga keagamaan masyarakat desa pakraman.

Sebagai lembaga keuangan mikro, LPD sangat besar peranannya dalam usaha sektor informal. Di Kabupaten Badung, tercatat ada 188 LPD di desa-desa adat yang sebagian besar krama desanya bekerja di sektor informal. Dari

modal awal LPD yang hanya Rp.4 juta sekarang asetnya telah milyaran rupiah. Bahkan ada LPD yang saat ini memiliki total aset hingga Rp.85 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya nilai lebih LPD yang membuat para nasabahnya, terutama kalangan pengusaha kecil dan mikro, lebih memilih LPD dibanding lembaga keuangan formal sebagai *back up finance* dalam usahanya. Nilai lebih itu yang kemudian menjadikan LPD di Bali lebih unggul dibandingkan lembaga keuangan formal yang ada.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan LPD

Laporan keuangan adalah suatu bentuk gambaran kinerja suatu perusahaan atau lembaga keuangan dalam suatu periode akuntansi yang berisi catatan informasi keuangan. Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.1, mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu mencerminkan seberapa jauh laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur dan adil

tentang penyajian posisi keuangan yang jadi dasar kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien .

2) Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi keuangan merupakan prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, menganalisis, serta melaporkan informasi manajemen keuangan dengan tepat di waktu yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi di perangkat komputer.

3) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sebuah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data yang didapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer.

4) Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikantan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya termasuk prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

5) Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah rencana operasional dan semua tindakan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan yang memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi

2.1.4 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) atau yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tata Kelola perusahaan yang baik, merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan atau dijalankan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan tersebut, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Terkandung beberapa pemahaman tentang pengertian *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh beberapa pihak, baik

dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom*, GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Jika pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga kinerja perusahaan baik yang bersifat *financial* maupun *non financial* juga akan turut membaik.

2.1.5 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Setiap perusahaan ataupun lembaga keuangan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sudah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran yang ada. Keberadaan teori agensi menjadi salah satu alasan munculnya prinsip-prinsip dari GCG ini. Permasalahan yang sering terjadi antara pihak principal dan agen dari suatu perusahaan menjadi sebuah dorongan munculnya konsep dari GCG, diharapkan melalui konsep GCG, konflik yang terjadi antara pihak principal dan agen dapat dikurangi melalui pengawasan terhadap kinerja dari para principal dan agen. Ada 5

prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menurut pedoman GCG Komite Nasional Kebijakan Governance (Boediono, 2006) yaitu:

1) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan maupun keterbukaan dalam mengungkapkan informasi-informasi materiil yang berkaitan dengan perusahaan. Dengan adanya prinsip transparansi, ini sejalan dengan konsep pada teori agensi dimana ada kemungkinan terjadinya asimetri informasi antara pihak *principal* dengan pihak *agent*. Dengan menerapkan prinsip transparansi, maka pihak *principal* bisa mengawasi dan mengontrol tindakan dari *agent*, karena dengan informasi yang jelas dan terbuka, pihak prinsipal dapat menilai apakah agen sudah bertindak sesuai dengan kepentingan mereka atau tidak, sehingga membantu mengurangi terjadinya kecurangan dalam penulisan laporan keuangan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan sebuah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas dalam teori agensi muncul ketika agen harus melaporkan kinerjanya kepada prinsipal, sehingga penerapan akuntabilitas akan menuntut adanya transparansi dari pihak agen dalam melaporkan kinerja dan laporan keuangan mereka. Laporan transparan memungkinkan prinsipal untuk memantau tindakan agen dengan lebih efektif dan mengurangi asimetri informasi yang bisa saja terjadi antara pihak prinsipal dan agen.

3) **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Responsibilitas atau bisa juga dikatakan sebagai tanggung jawab merupakan sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap semua peraturan perundangan berlaku terkait dengan pengelolaan perusahaannya. Prinsip responsibilitas merupakan kunci dalam mengatasi konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan. Teori agensi berfokus pada bagaimana prinsipal dapat memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Prinsip responsibilitas mendukung hal ini dengan menekankan bahwa agen harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan hasil yang dicapai dan pihak prinsipal juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ada mekanisme yang tepat untuk mendorong agen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka..

4) **Independensi (*Independency*)**

Prinsip independensi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi masalah agensi. Independensi melancarkan pelaksanaan atas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip independensi membantu mengatasi masalah yang muncul dari teori agensi dengan memastikan bahwa ada pengawasan yang tidak bias terhadap manajer, sehingga keputusan yang diambil lebih mungkin untuk sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan.

5) **Kewajaran (*Fairness*)**

Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip kewajaran sangat penting dalam mengelola hubungan agensi, dimana prinsipal harus memastikan bahwa agen diperlakukan dengan adil, termasuk dalam pemberian kompensasi dan insentif yang seimbang dengan tugas dan risiko yang dihadapi. Perusahaan yang dikelola dengan prinsip kewajaran cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang. Kewajaran dalam pengambilan keputusan, distribusi informasi, dan alokasi sumber daya membantu membangun kepercayaan antara prinsipal dan agen, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya agensi.

2.1.6 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika menerapkan prinsip-prinsip GCG. Manfaat dari penerapan prinsip GCG diantaranya adalah:

- 1) Melalui penerapan GCG, perusahaan dapat meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.

- 2) Perusahaan bisa meminimalkan *cost of capital*, hal ini menjadi dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
- 4) *Good Corporate Governance* (GCG) akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
- 5) Dengan *Good Corporate Governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
- 6) Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Penerapan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari diterapkannya prinsip-prinsip GCG diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan dari suatu organisasi yang memberikan kontribusi pada terciptanya kesejahteraan para pemegang saham, pegawai, dan *stakeholders* lainnya.

- 2) Meningkatkan legalitas organisasi yang dikelola secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Untuk melakukan penelitian ini, tentunya tidak akan terlepas dari penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Dengan adanya penelitian sebelumnya ini akan memperkuat hasil dari penelitian yang sedang penulis lakukan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga dapat digunakan sebagai pembandingan dengan hasil yang nantinya akan dihasilkan dari penelitian ini.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Andrian, Ashari, dan Hendriyanto (2022), membahas mengenai pengaruh prinsip-prinsip kompetensi sumber daya manusia, pemanfaat teknologi informasi, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan disiplin kerja terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan prinsip-prinsip GCG, dan disiplin kerja. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan uji analisis datanya menggunakan teknik penentuan skor, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (Andrian et al., 2022)

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Mulyanti dan Rahma (2020), membahas mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Iron Bird (*Blue Bird Group*). Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah penerapan GCG. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan uji analisis datanya menggunakan teknik uji validitas, uji reliabilitas, uji t, uji korelasi spearman rank, uji koefisien determinasi, analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (Mulyanti & Rahma, 2021)
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Gea (2022), membahas mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem informasi akuntansi sebagai variabel moderasi. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah GCG, sitem informasi akuntansi. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan, dan variabel moderasinya adalah sistem informasi akuntansi. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan uji analisis datanya menggunakan teknik uji validitas, uji reliabilitas, uji t,

uji korelasi spearman rank, uji koefisien determinasi, analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Gea & Putra, 2022)

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin, Titin, Gunadi, dan Elya (2021), membahas mengenai pengaruh implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* kinerja keuangan (studi kasus bank Bjb ZIEBAR Bandung, Jawa Barat). Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kinerja keuangan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan beberapa cara yaitu observasi, wawancara kuisioner, penelitian kepustakaan, dan eksplorasi internet dengan uji analisis datanya menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. (Wahyudin et al., 2022)

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dan Dinda (2020), membahas mengenai pengaruh prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada PT Agronesia (INKABA) Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah prinsip-prinsip GCG. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi sederhana, uji regresi linier, uji reliabilitas, uji validitas, uji koefisien determinan, dan

uji t. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (Tanjung & Sari, 2020)

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Harjito, Gete, dan Sugiarti (2022), membahas mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan efektivitas audit internal terhadap kualitas laporan keuangan di organisasi pemerintah daerah Kabupaten Ende, NTT. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah penerapan GCG dan efektivitas audit internal. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan uji analisis datanya menggunakan teknik uji validitas, uji reliabilitas, uji t, uji korelasi spearman rank, uji koefisien determinasi, analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Harjito et al., 2022)
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Trissiyani dan Suwandi (2024), membahas mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah penerapan GCG, sistem informasi akuntansi. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan uji analisis datanya menggunakan Analisa *outer model* dan Analisa *inner*

model. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Trissiyen & Suwandi, 2024)

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Bagiantio (2019), membahas mengenai pengaruh pengendalian internal; dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada perbankan di Kota Bandung). Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah penerapan GCG dan pengendalian internal. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik sampel jenuh dengan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Agustina & Bagianto, 2019)
- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Agatha, Diana, dan Mawardi (2020), membahas mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah kompetensi SDM, standar akuntansi pemerintah, dan penerapan GCG. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip

Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. (Agatha, 2020)

- 10) Penelitian yang dilakukan oleh Kuraesin dan Yadiati (2021), membahas mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas pelaporan keuangan di badan usaha milik negara (BUMN). Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah penerapan GCG. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (Kuraesin & Yadiati, 2021)
- 11) Penelitian yang dilakukan oleh Winarso dan Muawiyah (2019), membahas mengenai analisis pengaruh pengendalian internal sistem pendapatan jasa dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah penerapan GCG dan pengendalian internal sistem pendapatan jasa. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan uji analisis datanya menggunakan teknik uji validitas, uji reliabilitas, uji t, uji korelasi spearman rank, uji koefisien determinasi, analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (Winarso & Muawiyah, 2019)

- 12) Penelitian yang dilakukan oleh Azri dan Ruslim (2023), membahas mengenai pengaruh penerapan pengendalian internal, audit internal, dan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah pengendalian internal, audit internal, dan GCG. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Azri & Ruslim, 2023)
- 13) Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Putra (2020), membahas mengenai pengaruh *good corporate governance* dan budaya tri hita karana sebagai variabel moderasi pada kualitas laporan keuangan yang berlokasi di *money changer* Kabupaten Badung. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah prinsip-prinsip GCG dengan variabel moderasinya adalah budaya tri hita karana. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dengan melakukan analisis *moderated regressions analysis* (MRA). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Indriyani & Putra, 2020)
- 14) Penelitian yang dilakukan oleh Zeloverna, Jannah, dan Kususmastuti (2023), membahas mengenai pengaruh prinsip-prinsip *good corporate*

governance terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah GCG. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. ditulis dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan studi literatur menggunakan data hasil *library research* atau studi literatur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik *Good Corporate Governance* yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. (Zelovena et al., 2023)

- 15) Penelitian yang dilakukan oleh Amali, Karina, dan Digdowiseiso (2023), membahas mengenai analisis pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah penerapan GCG dan ukuran perusahaan, dan leverage. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode sampling jenuh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. (Amali et al., 2023)